

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2002, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta, Salemba Empat.
- Abdul, Halim (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta : Salemba Empat.
- Bagian keuangan SBB sosialisasi Permendagri nomor 13. [www.balagu.com](http://www.balagu.com).
- Bastian, Indra, 2006, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Jakarta, Erlangga.
- Dedi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra, Maulidah Rahmawati, 2007, Akuntansi Pemerintahan, Jakarta, Salemba Empat.
- Fauziah. (2011). Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kabupaten Lima Puluh Kota (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Daerah). *Jurnal Skripsi*.
- Hafiz, Abdul T, 2007, Akuntansi Pemerintahan Daerah, Bandung, Alfabeta.
- Harahap, Sofyan S, 2003, Teori Akuntansi, Edisi Revisi, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Henry, Simamora (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi ke-3*, Yogyakarta : STIE YKPN.
- Jayanti,A. (2011). Standart Akuntansi Pemerintahan. <http://anggunfreeze.blogspot.com/2012/11/standar-akuntansi-pemerintahan.html>
- Kusuma, R, S. (2013). Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI (Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Jember). *Jurnal Skripsi*.
- Mansoara, N. (2013). Pencatatan dan Pelaporan Belanja pada Kecamatan Bunaken Kota Manado.
- Mahmudi, 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi kedua. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002, Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Yogyakarta, JAAI.
- Massie, J. B. (2016). Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Langsung Pada Skpd Di Kota Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 870–879.
- Mewengkang, J; Sabijono, H; Pengerapan, S. (2016). Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Di Kabupaten Bolaang Mongondow. 4(71), 817–825.
- Muhammad Gede, 2002, Akuntansi Pemerintahan, Jakarta, lembaga penerbit fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Mulyadi (2008). *Sistem Akuntansi*, Jakarta : Salemba Empat.
- Noerdiawan D, Iswahyudi, Maulidah, 2007, *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta,
- Pandoh, G.F; Tinangon, J.j; Lambey, R. (2016). Evaluasi Sistem Pencatatan Belanja Langsung Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.

- Peraturan Bupati Lumajang No 73 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sitepu, E. G. (2015). Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal Pada Direktorat Jendral Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara.  
SKRIPSI/JURNAL/pengelolaan keuangan negara \_ andichairilfurqan.html ( bab 2 ).html
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Tampanatu, Anastasia P. T., 2013. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Langsung pada SKPD di Kota Bitung. Jurnal EMBA. Vol. 1 No. 4. . Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi, Manado.  
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1943/1540>. Diakses 5 Oktober 2014. Hal. 90-97
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-undang No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta.
- Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Jakarta.
- Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang - Undang RI Nomor 45 Tahun 2007 Belanja pegawai

Undang - Undang RI Nomor 45 Tahun 2007 Belanja barang dan jasa

Untari, R. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Pada Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Walangitan, C; Morasa, J; Kalalo, M. (2016). Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Langsung Pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan kota Manado.

Yudea. (2018). Evaluasi Penerapan Realisasi Anggaran dan Laporan Keuangan Terhadap Permendagri No 64 Tahun 2013.

